

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralisasi, dimana pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Pemerintah melaksanakan pembangunan atas kehendak rakyat yang di representasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Salah satu aspek dari Pemerintah Daerah yang harus diatur dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah lainnya secara hati-hati adalah penyusunan RAPBD. RAPBD merupakan rencana kerja tahunan untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah baik rutin maupun pembangunan yang diukur dan diperhitungkan dengan uang.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Sejalan dengan pendapat diatas, Indra Bastian (2011) juga mengemukakan bahwa, dengan berpedomaan pada prinsip-prinsip penganggaran dan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, maka belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan

fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Anggaran adalah rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang tertuang secara kuantitatif. Informasi yang dapat diperoleh dari anggaran di antaranya jumlah produk dan harga jualnya untuk tahun depan. Dan juga anggaran memberikan gambaran kepada manajemen tentang sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan dalam anggaran. Sedangkan anggaran pada sektor publik memberikan gambaran mengenai rencana tentang berapakah dana yang akan diperlukan untuk melaksanakan rencana yang telah dibuat dan cara yang bagaimana yang harus dilakukan untuk mendapatkan uang sehingga bisa mendanai rencana yang telah dibuat tersebut.

Sistem penyusunan anggaran yang baik tentu akan menghasilkan anggaran yang berkualitas dan sesuai dengan harapan masyarakat. Proses penyusunan anggaran baik itu APBD maupun APBN seringkali menjadi isu penting yang menjadi sorotan masyarakat, bahkan APBD atau APBN tersebut menjadi alat politik yang digunakan oleh pemerintah sendiri maupun oleh pihak oposisi.

Maka dari itu, tahapan penyusunan anggaran merupakan tahapan yang sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja justru bisa mengagalkan program yang telah disusun sebelumnya. Sering dijumpai dalam praktek, penyusunan anggaran seolah-olah merupakan bagian yang terpisah dengan perumusan dan perencanaan strategik, sehingga keberhasilan penerapan anggaran tidak sejalan dengan keberhasilan program dan tujuan organisasi. Penganggaran seperti ini tidak bisa

menghasilkan anggaran yang efektif sebagai alat manajemen untuk menjembatani pencapaian tujuan organisasi.

Untuk menghasilkan penyelenggaraan anggaran daerah yang efektif dan efisien, tahap persiapan atau perencanaan anggaran merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan. Namun demikian, tahap persiapan atau penyusunan anggaran harus diakui memang hanyalah salah satu tahap penting dalam keseluruhan siklus/proses penyusunan anggaran daerah tersebut.

Berdasarkan gambaran diatas, maka penulis tertarik untuk mempelajari dan mengetahui tentang bagaimana prosedur penyusunan anggaran dengan melakukan kuliah kerja praktek/magang sebagai pengimplementasian teori yang telah didapat diperkuliahan dan menuangkannya kedalam bentuk laporan kerja praktek/proposal magang dengan judul yaitu **“Prosedur Penyusunan Anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul yang telah dikemukakan di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas penulis adalah **“Bagaimana Prosedur Penyusunan Anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang?”**

1.3 Tujuan Magang

Adapun tujuan dilaksanakan kegiatan magang di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang adalah untuk mengetahui bagaimana Prosedur

Penyusunan Anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang.

1.4 Manfaat Magang

Manfaat yang diperoleh penulis selama kegiatan magang ini adalah:

a. Bagi Penulis

1. Mendapatkan pengalaman dan juga dapat memahami bagaimana dunia kerja yang sebenarnya sehingga sewaktu sudah bekerja nanti sudah tau bagaimana cara untuk menyocokkan diri dengan lingkungan kerja.
2. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam melakukan suatu pekerjaan yang biasa dilakukan oleh para pegawai instansi tersebut.
3. Dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu yang diperoleh penulis selama bangku perkuliahan sehingga penulis bisa merasakan langsung manfaat ilmu-ilmu yang telah dipelajari selama di bangku perkuliahan.

b. Bagi Program Dimploma III FE UA

1. Dapat menjaga hubungan kerjasama dengan instansi atau perusahaan sehingga nanti bisa terus menerima mahasiswa khususnya mahasiswa Diploma III FE UA untuk terus magang di instansi tersebut.
2. Dapat melihat seberapa banyak ilmu-ilmu pengetahuan yang sudah diajarkan maupun yang diterapkan untuk mengarahkan mahasiswa memahami akan dunia kerja.
3. Mempererat kerjasama antara Universitas dengan instansi atau perusahaan.

4. Menghasilkan tenaga kerja profesional yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian sesuai dengan tuntutan lapangan.

c. Bagi Perusahaan/Instansi

1. Salah satu cara untuk membangun kerjasama lebih lanjut baik yang bersifat akademis maupun non akademis antara universitas dengan instansi.
2. Instansi bisa melihat dan menilai tenaga kerja potensial di kalangan mahasiswa sehingga apabila suatu saat instansi atau perusahaan membutuhkan karyawan bisa merekrut mahasiswa tersebut.
3. Ikut andil dengan cara melakukan pelatihan terhadap mahasiswa sehingga menjadi tenaga kerja yang berkualitas dan profesional.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Dalam pelaksanaan kegiatan magang ini saya sebagai penulis memilih instansi tempat magang yaitu pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang yang beralamat di Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 70 Telp. (0751) 32374, 32377 Fax (0751) 33996, 32394. Sedangkan untuk waktu kegiatan magang ini sendiri dilaksanakan selama 42 (empat puluh dua) hari masa kerja yang dimulai dari tanggal 07 Januari 2019 s/d 06 Maret 2019.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematikan penulisan pada laporan magang ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, tempat dan waktu magang serta sistematika penulisan.

BAB II

LANDASAN TEORIS ANDALAS

Bab ini membahas tentang pengertian anggaran, fungsi anggaran, tujuan anggaran, prinsip-prinsip penyusunan anggaran, pendekatan proses penyusunan anggaran, proses penyusunan anggaran dan landasan hukum penyusunan anggaran.

BAB III

GAMBARAN UMUM

Bab ini membahas tentang gambaran umum Kota Padang, gambaran umum dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang, Dasar Pembentukan BPKAD Kota Padang, Visi dan Misi BPKAD Kota Padang, serta Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi dari BPKAD Kota Padang.

BAB IV

PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai bagaimana prosedur penyusunan anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang dan apa saja hambatan dalam proses penyusunan anggaran.

BAB V

PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari laporan magang dan saran-saran dari penulis yang dapat menjadi masukan bagi instansi dan pihak-pihak yang berkepentingan dimasa yang akan datang.

